



DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

# RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) 2024-2026



#DAMKARPURWAKARTA

Jln Jendral Ahmad Yani No. 113  
Kelurahan Cipaisan Kecamatan  
Purwakarta Kabupaten Purwakarta

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rencana Strategis ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Rencana strategis ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator *output* kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami berharap bahwa Rencana Strategis yang merupakan dokumen strategis dan pedoman program kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode 2024-2026 dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab oleh seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta yang pada gilirannya telah berperan aktif dan memberikan

kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi peningkatan pengelolaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Desember 2023  
KEPALA DINAS-PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PURWAKARTA



**JUDDY HERDIANA SUHENDAR**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP.19720128 199101 1001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK .....	viii
BAB I .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
BAB II .....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	12
2.2.1 Pegawai .....	12
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	14
2.3 Kinerja Pelayanan.....	16
2.3.1 Target Pencapaian SPM oleh Daerah .....	17
2.3.2 Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah.....	17
BAB III .....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	29
3.2.1 Telaahan Renstra Provinsi .....	29
3.2.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga .....	32
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	47
3.4 Penentuan isu-isu strategis.....	49
BAB IV .....	50
4.1 Tujuan.....	50
4.2 Sasaran .....	50

BAB V .....	54
Strategi Dan Arah Kebijakan .....	54
BAB VI .....	60
Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	60
BAB VII .....	89
Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	89
BAB VIII .....	90
Penutup.....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1	: Jumlah pegawai berdasarkan status Kepegawaian.....	17
Tabel 2.2.1.2	: Jumlah berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	18
Tabel 2.2.1.3	: Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	18
Tabel 2.2.1.4	: Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Tabel 2.2.2.1	: Data Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	19
Tabel 2.2.2.2	: Data Inventaris Kendaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	20
Tabel 2.3.1	: Realisasi Capaian SPM Sub Urusuan Kebakaran Tahun 2022.....	23
Tabel T-C.23	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta.....	26
Tabel T-C.24	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta 2018- 2022.....	27
Tabel 3.2.1.1	: Pembagian Kewenangan Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan UU No 23/2014.....	35
Tabel 3.2.1.2	: Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Sarana Renstra Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
Tabel 3.2.1.2	: Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat.....	38
Tabel T-C.25	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	58
Tabel T-C.26	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	63

Tabel T-C 27 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemadam  
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta Tahun  
2024-2026.....67

Table 7.2.1.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....89

## DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.2.1.....	12
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .....	12
Gambar 2.2.1 .....	27
Pos Wilayah Manajemen Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta.....	27

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3.1 Grafik Rekapitulasi Kejadian Kebakaran .....	26
Grafik 3.2 Grafik Rekapitulasi Penyelamatan .....	26

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 248 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta merupakan perangkat daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Selanjutnya, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024-2026 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategi 5 (lima) tahun sebelumnya (Renstra 2018-2023), kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 3 (tiga) tahun ke depan, dampak pandemi *Covid-19*, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor .... Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 248 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan periode 2024-2026;
- c. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya guna menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2024-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
- d. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2024-2026.

### 1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis ini disusun bertujuan untuk :

Menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan;

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang Penyusunan Renstra DPKP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPKP KABUPATEN PURWAKARTA**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPKP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPKP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPKP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPKP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPKP.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RT/RW dan penentuan isu-isu strategis;

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Purwakarta. Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat strategi dan kebijakan untuk lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini merumuskan INDIKATOR KINERJA DPKP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta**

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Adapun Kewenangan Dinas dalam Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran adalah :

1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman;
2. Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;
3. Mitigasi kebakaran;
4. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
5. Investigasi kejadian kebakaran; dan
6. Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia;
7. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Ruang lingkup tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;
2. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
4. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran;
5. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
6. Melakukan investigasi kejadian kebakaran;

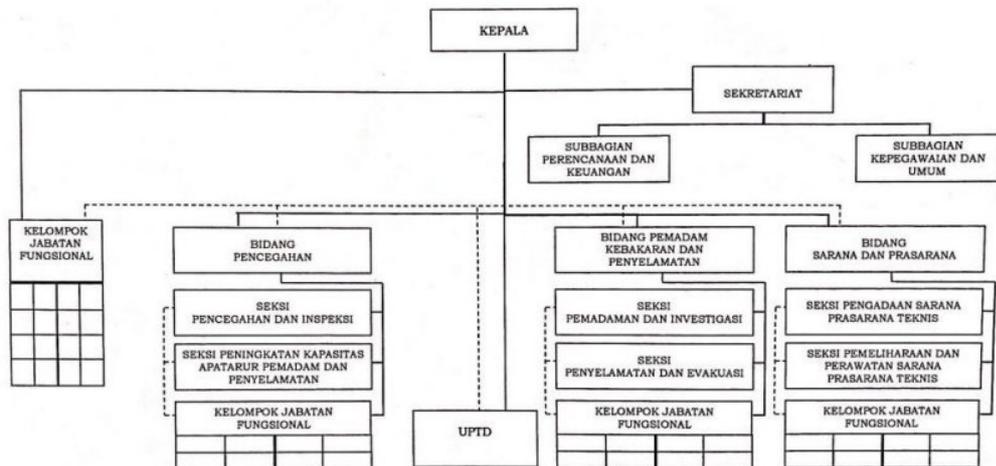
7. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran, jabatan fungsional analis kebakaran dan jabatan fungsional lainnya yang berkaitan dengan sub urusan kebakaran;
8. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia;
9. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran;
10. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
11. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
12. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
13. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
14. Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan

Adapun susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pencegahan, terdiri atas :

1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
  2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
1. Seksi Pemadaman dan Investigasi;
  2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknis;
  2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Teknis; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD, terdiri dari :
1. Pemadam Kebakaran Wilayah I, kelas A;
  2. Pemadam Kebakaran Wilayah II, kelas A; dan
  3. Pemadam Kebakaran Wilayah III, kelas A.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan 2.2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**



**2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

**2.2.1 Pegawai**

Jumlah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 154 orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	%
1	PNS	42 orang	27,2%
2	PTT	10 orang	6,5%
3	THL	100 orang	65%
4	Kebersihan	2 orang	1,3%
JUMLAH		154 orang	100%

Tabel 2.2.1.2  
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

<b>NO.</b>	<b>PANGKAT/GOL.</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
1.	Golongan IV	6 orang	3,9%
2.	Golongan III	17 orang	11%
3.	Golongan II	19 orang	12,3%
4.	Golongan I	0 orang	0%
5.	PTT	10 orang	6,5%
6.	THL	100 orang	65%
7.	Kebersihan	2 orang	1,3%
<b>JUMLAH</b>		154 orang	100%

Tabel 2.2.1.3  
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
1.	Pasca Sarjana	6 orang	3,9%
2.	Sarjana	28 orang	18,2%
3.	Diploma III	2 orang	1,3%
4.	Diploma II	1 orang	0,65%
5.	SLTA	110 orang	71,4%
6.	SLTP	6 orang	3,9%
7.	SD	1 orang	0,65%
<b>JUMLAH</b>		<b>154 orang</b>	<b>100%</b>

Tabel 2.2.1.4  
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

<b>NO.</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
1.	Laki-laki	131 orang	85%
2.	Perempuan	23 orang	15%
<b>JUMLAH</b>		154 orang	100%

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.2.2.1

Data Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Nama Barang	No Polisi	Jumlah	
1	Komputer (PC All-in-One)	LENOVO	5	Unit
2	Harddisk	SEAGATE	1	Unit
3	Printer L4150	EPSON	3	Unit
4	Printer L3310	EPSON	1	Unit
5	Laptop	HP Probook 430 G3, Intel Core i3, RAM 8 GB	2	Unit
6	Komputer (PC All-in-One)	LENOVO	1	Unit
7	Komputer (PC All-in-One)	DELL	1	Unit
8	Printer L1110	EPSON	3	Unit
9	Scanner	CANON DR-F120	1	Unit
10	Alat Fitness Butterfly Machine	Alat Fitness Butterfly Machine	1	Unit
11	Alat Fitness Pull Down Machine	Alat Fitness Pull Down Machine	1	Unit
12	Alat Fitness Leg Press Hack Squat	Alat Fitness Leg Press Hack Squat	2	Unit
13	Alat Fitness Treadmill Elektrik	Alat Fitness Treadmill Elektrik	2	Unit
14	Sound System	JBL	1	Unit
15	Sepeda Statis	KETTLER	2	Unit
16	Kompur Gas	Rinai	5	Unit

17	Keyboard	LOGITECH MK295	1	Unit
18	Lemari Besi	FRONTLINE	9	Unit
19	Meja Kerja	UNO	2	Unit
20	Wearpack	Wearpack	18	Buah
21	Kamera Digital	CANON	1	Buah
22	Pompa Air	HONDA	1	Unit
23	Pitot Gauge	Pitot Gauge	2	Buah
24	Face Detector (Mesin Absen)	HIKVISION	1	Unit
25	Mesin Gerinda Mini	Mesin Gerinda Mini	1	Buah
26	SCBA	SCBA	2	Unit
27	Baju Anti Lebah	Baju Anti Lebah	5	Unit
28	Sepatu Karang	Sepatu Karang	12	Pasang
29	Helmet Rescue	Helmet Rescue	10	Buah
30	Hybrid Inflatable Device	Hybrid Inflatable Device	12	Buah
31	Tali Karmantel	Tali Karmantel	1	Buah

Tabel 2.2.2.2

Data Inventaris Kendaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Nama Barang	No Polisi	Jumlah	
1	Toyota Kijang	T 1368 B	1	Unit
2	Suzuki APV/Ambulan	T 9914 B	1	Unit
3	Toyota Hilux	T 8350 A	1	Unit
4	Toyota Hiluk Double Cabin 4x4	T 8454 A	1	Unit
5	Isuzu Fire Truck	T 9910 A	1	Unit
6	Isuzu Fire Truck	T 9909 A	1	Unit
7	Hino Fire Truck	T 9925 B	1	Unit
8	Isuzu Fire Truck	T 8115 A	1	Unit

9	Hino Fire Truck	T 9941 J	1	Unit
10	Hino Fire Truck	T 9942 J	1	Unit
11	Hino Fire Truck	T 9901 B	1	Unit
12	Sepeda Motor Kaisar (roda tiga)	T 2393 B	1	Unit
13	Sepeda Motor/Honda Trail CRF	T 3482 B	1	Unit
14	Sepeda Motor/Honda Trail CRF	T 3484 B	1	Unit
15	Sepeda Motor/Honda Trail CRF	T 3485 B	1	Unit
16	Sepeda Motor/Honda T4G02T31L0	T 4153 B	1	Unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja dalam arti untuk kerja atau *performance*, berkaitan dengan hasil akhir atau *outcome* yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktifitas dijalankan selama kurun waktu tertentu, sedangkan pelayanan memiliki arti pemenuhan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa secara efektif dan memuaskan. Dengan demikian kinerja pelayanan suatu organisasi pasti mencerminkan tingkat pencapaian dari tugas pokok dan fungsi suatu organisasi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta melalui layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang mencangkup mutu jenis layanan sebagai berikut :

- a. Layanan Respon Cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan

e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

### **2.3.1 Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran melalui Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan Indikator pencapaian adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan target capaian 100% dalam batas waktu setahun.

### **2.3.2 Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah**

Realisasi di tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta terjadi 138 kali kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejumlah 125 kejadian kebakaran. Selain itu, terdapat 1 (satu) Kejadian kebakaran yang ditangani pertama kali oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta dalam rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit sebelum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta tiba di lokasi. Jumlah keseluruhan korban jiwa kebakaran dan terdampak kebakaran adalah 7 (tujuh) orang. Petugas pemadam kebakaran berhasil melakukan pertolongan dan penyelamatan terhadap 6 (enam) orang. Selebihnya terdapat 1 (satu) orang yang meninggal dunia

dan 6 (enam) orang lainnya yang mengalami luka bakar dan/atau luka fisik lainnya. Selain kejadian kebakaran, selama tahun 2022 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 921 (Sembilan ratus dua puluh satu) kali, terdiri dari penyelamatan yang dilakukan di air (*water rescue*) 7 (tujuh) kali, penyelamatan yang dilakukan pada ketinggian (*vertical rescue*) 4 (empat) kali, penyelamatan dan evakuasi terhadap binatang (*animal rescue*) 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) kali, penyelamatan dan evakuasi di lokasi bencana alam (*disaster*) 54 kali, dan membantu melepaskan cincin, mengevakuasi orang sakit dan bantuan medis sementara (*medical*) 93 kali.

Tabel 2.3.1

Realisasi Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERSENTASE		%
5.4	Pelayanan Respon Cepat ( <i>Response Time</i> ) penanggulangan kejadian kebakaran;	Jumlah kasus yang ditangani dengan respon cepat penanggulangan kejadian kebakaran	Jumlah kasus	
		125	138	90.5 7
5.5	Pelayanan pelaksanaan pemadaman dan	Jumlah kasus yang ditangani dengan pelayanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	Jumlah kasus	

	pengendalian kebakaran;			
		138	138	100
5.6	Pelayanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;	Jumlah kasus yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi	
		921	921	100
5.7	Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan	Jumlah desa yang mendapat pelayanan pemberdayaan	Jumlah desa yang ditargetkan mendapat pelayanan pemberdayaan	
		87	192	45.3 1
5.8	Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.	Jumlah pelayanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	Jumlah pelayanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	
		112	67	59.8 21

Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Adapun capaian

kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dapat dilihat pada table T-C.23 berikut :

Tabel T-C.23

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta

NO	INDIKATOR IKK/NSPK/SPM DAN LAINNYA	2018		2019		2020		2021		2022		KETERANGAN
		Target	Capaian									
1.	Tingkat Keamanan, tentram dan tertib dari bahaya kebakaran dan kebencanaan	60	60	60	60	71	95,55	82	95,76	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (2018-2021)
2.	Indeks Ketahanan Daerah	100	100	100	100	100	33	100	0.66	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (2018-2021)
3.	Persentase Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran	-	-	-	-	-	-	100	0.00	100	90,58	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (2022)

### 2.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Tabel T-C.24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
 Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2022

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					KET
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	5,032,504,000	0	-	-	0	4,851,410,330	0	-	-	-	96	-	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	2,370,000,000	0	-	-	0	2,343,329,350	0	-	-	-	99	-	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	175,000,000	0	-	-	0	173,000,000	0	-	-	-	99	-	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	170,000,000	0	-	-	0	168,375,000	0	-	-	-	99	-	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	47,500,000	0	-	-	0	39,430,000	0	-	-	-	83	-	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana

Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	0	0	6,650,870,000	-	-	0	0	6,549,522,386	-	-	-	-	98	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Pencegahan dan Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat	0	0	90,000,000	-	-	0	0	88,620,000	-	-	-	-	98	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana DPKPB	0	0	844,850,000	-	-	0	0	841,181,450	-	-	-	-	100	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0	0	2,815,420,000	-	-	0	0	2,791,634,800	-	-	-	-	99	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi	0	0	450,000,000	-	-	0	0	425,606,400	-	-	-	-	95	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	0	400,000,000	-	-	0	0	396,144,900	-	-	-	-	99	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Kedaruratan dan Logistik	0	0	375,000,000	-	-	0	0	314,673,300	-	-	-	-	84	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	0	1,125,000,000	0	-	-	0	1,078,066,755	0	-	-	-	96	-	-	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	14,224,175,138	13,148,034,188	-	-	-	13,495,170,986	12,114,571,078	-	-	-	95	92	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Penanggulangan Bencana	-	-	-	919,370,806	-	-	-	-	900,429,907	-	-	-	-	98	-	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	-	-	2,195,978,132	1,635,607,983	-	-	-	2,169,194,168	1,562,461,276	-	-	-	99	96	Dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan yang akan berdampak signifikan di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan mengurangi kualitas pelayanan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta.

Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

1. Peningkatan tata kelola manajemen organisasi dan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi berbasis keadilan dan penegakan hukum;
2. Meningkatkan dukungan penataan perumahan padat penduduk untuk mengurangi potensi kejadian kebakaran;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sinkronisasi program dan kegiatan dengan berbagai pihak diperkuat dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai dukungan operasional;
5. Meningkatkan pengawasan dan partisipasi dunia usaha, pemilik gedung guna mencegah potensi kebakaran dan bencana alam dilandasai penegakan hukum.

**Grafik 3.1**  
**Grafik Rekapitulasi Kejadian Kebakaran**



Sumber : Dinas Damkar 2022

**Grafik 3.2**  
**Grafik Rekapitulasi Penyelamatan**



Sumber : Dinas Damkar 20

**Gambar 1**  
**Pos Wilayah Manajemen Kebakaran**  
**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**  
**Kabupaten Purwakarta**



Sumber : Dinas Damkar 2022

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu : "Belum optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran" yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran;

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134 untuk kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas agar memperoleh hak utama untuk didahulukan;
  - b. Belum optimalnya aksesibilitas, jarak dan waktu tempuh dari pos eksisting ke lokasi kejadian kebakaran;
  - c. Belum optimalnya alur penyampaian informasi kebakaran pada masyarakat sehingga petugas menerima laporan dari masyarakat saat api sudah membesar (tahap *flashover* – penyalan serentak);
- 2) Belum optimalnya layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- a. Belum adanya naskah kesepakatan bersama dengan *stakeholder* dalam mengamankan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MOU);
  - b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pemadaman dan pengendalian kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
- 3) Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;

- 4) Layanan pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran;
- 5) Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran
  - a. Peran Instansi Pemadam Kebakaran terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Layak Fungsi suatu bangunan tidak tegas dan belum jelas;
  - b. Meningkatnya kompleksitas kepadatan pemukiman penduduk;
  - c. Penyelenggaraan bangunan Gedung serta perkembangan industry dewasa ini sering membawa konsekuensi meningkatnya resiko terjadinya bahaya kebakaran apabila aspek keselamatan tidak diperhatikan;
  - d. Infrastruktur yang ada masih belum mendukung efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

### **3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

#### **3.2.1 Telaahan Renstra Provinsi**

Memperhatikan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta dapat dijelaskan bahwa urusan kebakaran di Tingkat Provinsi Jawa Barat belum terbentuk khusus Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 terbit urusan kebakaran masih dibawah Dinas Permukiman dan mulai tahun 2021 baru dibebankan ke BPBD Provinsi Jawa Barat, namun secara ringkas terkait kewenangan antara Provinsi dengan Kabupaten urusan Trantibumlinmas Sub Urusan

Kebakaran menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 melalui tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.1.1  
Pembagian Kewenangan Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan  
Kebakaran sesuai dengan UU No 23/2014

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
2	Kebakaran	a. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran b. Standarisasi Kompetensi dan Sertikasi Tenaga Pemadam Kebakaran c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Kebakaran	a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran c. Investigasi Kejadian Kebakaran d. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Tabel 3.2.1.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran Jangka Menengah Renstra SOPD Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan pada Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman yang terjangkau	Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di permukiman dan perumahan	Belum optimalnya pembiayaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Adanya akses dan sinkronisasi program permukiman dan perumahan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dari pemerintah provinsi dan pusat

Tabel 3.2.1.2

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya ketahanan daerah jawa barat	Belum optimalnya penanggulangan bencana di Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sinergitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</li> <li>2. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</li> <li>3. Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</li> <li>4. Belum optimalnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana</li> </ol>
		Belum optimalnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</li> <li>2. Belum optimalnya Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</li> </ol>

### 3.2.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan

pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020- 2024 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam lima tahun ke depan. Namun, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada awal Tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan terjadinya serangan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, yang menurut *World Health Organization (WHO)* kejadian tersebut berawal ditemukan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi (penyebab penyakitnya) tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan terjadinya pandemi *Covid-19* tersebut, berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun lokal Indonesia. Dampak tersebut perlu diantisipasi dalam perumusan Renstra Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam perumusan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis lima tahun ke depan. Hal ini mengingat karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi *Covid-19* tersebut akan berakhir.

Dalam penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya (Renstra 2015-2019), kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 (lima) Tahun ke depan, dan dampak pandemi *Covid-19*, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut: (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, (2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender, dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

1. Pembangunan SDM;  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur;  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi;  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi;  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi.  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pementapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

**1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis;**

- 1) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi;
  - a. Indeks Demokrasi Indonesia;
  - b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada;
  - c. Indeks Kinerja Ormas.
- 2) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
  - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi;
  - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM);
  - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi;
  - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- 3) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional;

4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- a. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

**2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut;**

- 1) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi;
  - a. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun;
  - b. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri;
  - c. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional;
  - d. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- 2) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 3) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi;
  - a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM;
  - d. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - e. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik";
  - f. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - g. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi;
  - h. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama";
  - i. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah;
  - j. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- 4) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi;
- a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- 5) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

**3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis;**

- 1) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
  - a. Indeks Pengawasan Internal;
  - b. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- 3) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi;
2. Peningkatan kapasitas partai politik;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada;
4. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan;
5. Penghayatan, pengamalan, pembumih nilai-nilai ideologi Pancasila;
6. Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Fasilitasi penanganan konflik sosial;
8. Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah;

9. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) difokuskan pada;

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui;
  - a. Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan;
  - b. Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri;
  - c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri.
2. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui;
  - a. Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - b. Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda;
  - c. Analisis kebutuhan pembentukan Perda;
  - d. Reviu Ranperda dan Ranperkada;
  - e. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (*research based policy*).
3. Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui;
  - a. Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik;
  - b. Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional;
  - c. Pengembangan profil daerah;
  - d. Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran

- Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah;
  - f. Pengembangan seni kerajinan nasional;
  - g. Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa;
  - h. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa.
  - i. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur pro investasi;
  - j. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
  - k. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi *Covid-19*.
4. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui:
- a. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa;
  - c. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan Kepamongprajaan (IPDN);

- d. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
  - e. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara;
  - f. Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah;
  - g. Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah;
  - h. Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah.
5. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui;
- a. Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
  - b. Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - c. Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
  - d. Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.
  - e. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel;
  - f. Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah;
  - g. Penguatan kinerja Inspektorat Daerah;

- h. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
6. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui:
- a. Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital
  - b. Implementasi *One Stop Services* (OSS) pada PTSP di Daerah;
  - c. Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal;
  - d. Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi;
  - e. Peningkatan capaian penerapan SPM;
  - f. Penguatan inovasi daerah.
7. Penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui:
- a. Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru;
  - b. Penerapan standar pelayanan perkotaan;
  - c. Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan strategis nasional;
  - d. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan stunting;
  - e. Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah termasuk Ibukota Negara baru;
  - f. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan.
  - g. Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa;

- h. Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE (*Smart Village*);
  - i. Fasilitasi Penerapan *Smart City*.
8. Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan datacenter SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru. Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) difokuskan pada:
- a. Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri;
  - c. Pembangunan sistem informasi pengawasan;
  - d. Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri;
  - e. Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil penelaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran;
2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
3. Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah;

4. Penerapan SPM sub urusan kebakaran masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraannya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi, tuntutan pemanfaat teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran.

Upaya Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan kebakaran sesuai standar dengan indikator :

1. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang kebakaran;
2. Persentase daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi;
3. Persentase daerah yang memenuhi standardisasi sarpras pemadam kebakaran dan penyelamatan;
4. Persentase daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan sesuai standar;
5. Jumlah NSPK bidang kebakaran;
6. Layanan damkar sesuai standar di daerah.

Upaya Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar dengan menetapkan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran.

Berdasarkan telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 di atas maka hal ini sudah sejalan dengan Renstra Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta yaitu mewujudkan peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan penentuan lokasi kegiatan, begitu pula dengan penyusunan Rencana Strategis. Tujuan penataan ruang kabupaten Purwakarta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksud untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purwakarta dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Salah satu dokumen yang ditelaah yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisi yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi besar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana dan program dalam rangka menghadirkan Kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, perencanaan tata ruang wilayah

memiliki berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah, kebijakan penataan ruang dilakukan melalui:

1. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (interchange);
2. Pengembangan sentra produksi pertanian terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan/atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
3. Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
4. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
5. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Penyelenggaraan penataan ruang seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bertujuan untuk untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, aman tersebut dapat diartikan sebagai aman dari resiko bahaya kebakaran, disinilah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hadir dengan memperhatikan aspek pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan urusan kebakaran.

### **3.4 Penentuan isu-isu strategis**

Berdasarkan hasil penelaahan pelayanan, penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah, penelaahan rencana strategis kementerian/Lembaga, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purwakarta, dapat diperoleh isu strategis terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta. Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Adapun isu strategis tersebut adalah :

1. Peningkatan tata kelola manajemen organisasi dan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi berbasis keadilan dan penegakan hukum;
2. Meningkatkan dukungan penataan perumahan padat penduduk untuk mengurangi potensi kejadian kebakaran;
3. Meningkatkan sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang tersertifikasi;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sinkronisasi program dan kegiatan dengan berbagai pihak diperkuat dukungan sumber daya manusia/ petugas yang berkualitas;
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai dukungan operasional;
6. Meningkatkan pengawasan dan partisipasi dunia usaha, pemilik gedung guna mencegah potensi kebakaran dan bencana alam dilandasai penegakan hukum.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan**

Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam tiga tahun ke depan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, yaitu :

Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Indikator : 1. Cakupan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran  
2. Persentase Layanan Penyelamatan Non Kebakaran

Tujuan : Meningkatkan sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang tersertifikasi

Indikator : 1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah  
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

#### **4.2 Sasaran**

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan sasaran dalam jangka waktu tiga tahun ke depan yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Indikator : 1. Cakupan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran  
2. Persentase Layanan Penyelamatan Non Kebakaran
- Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.
- Indikator : 1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah  
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel T-C.25  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Meningkatnya Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Cakupan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran	Persen	100	100	100
			2. Persentase Layanan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	100
2.	Meningkatkan sumber daya aparatur	2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B

	pemadam kebakaran dan penyelamatan yang tersertifikasi	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE.	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK
--	---	---	-------------------------------	----------	------	------	------

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau Langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun, penyusunan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi yang tertuang dalam RPD.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strenghts/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang dan Threats/ancaman*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenghts*)
  - a. Adanya peraturan Kepala Daerah tentang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan serta tata kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  - b. Adanya peraturan-peraturan pendukung tugas lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  - c. Adanya dukungan dana APBD untuk kegiatan operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta
2. Kelemahan (*Weaknesses*)
  - a. Masih Kurangnya Kualitas Standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009;
  - b. Masih rendahnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Yang Belum Memadai;
  - d. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran
3. Peluang (*Opportunitites*)
  - a. Banyaknya dukungan dari berbagai pihak dalam peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - b. Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Partisipatif masyarakat dalam hal penanggulangan kebakaran;

- c. Meningkatnya kebutuhan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran yang responsive dan handal;
  - d. Pertumbuhan masyarakat meningkat mengakibatkan risiko terhadap kebakaran di perumahan dan pemukiman;
  - e. Perkembangan teknologi dan informasi.
4. Ancaman (*Threats*)
- a. Kurang efektifnya koordinasi dengan Perangkat Daerah yang lain;
  - b. Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan SKPD di Bidang Pemadam Kebakaran;
  - c. Masih rendahnya pemilik bangunan Gedung tentang penerapan pencegahan kebakaran;
  - d. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang mitigasi kebakaran

Tabel T-C.26

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: Purwakarta Cerdas Berakhlakul Karimah		
Misi I	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
Misi II	: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Reformasi Birokrasi

**Diagram Matriks SWOT Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan Kabupaten Purwakarta :**

<p align="center"><b>IFAS</b></p> <p align="center"><b>EFAS</b></p>	<p><b>Kekuatan (Strength) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya peraturan Kepala Daerah tentang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan serta tata kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</li> <li>▪ Adanya dukungan dana APBD untuk kegiatan operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</li> </ul>	<p><b>Kelemahan (Weakness) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih kurangnya kualitas standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009</li> <li>▪ Masih rendahnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>▪ Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai</li> <li>▪ Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran</li> </ul>
<p><b>Peluang (Opportunities) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyaknya dukungan dari berbagai pihak dalam peningkatan sumber daya manusia</li> <li>▪ Tersedianya peraturan pemerintah tentang partisipatif masyarakat dalam hal penanggulangan kebakaran</li> <li>▪ Meningkatnya kebutuhan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran yang responsive dan handal</li> </ul>	<p><b>Strategi SO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan non kebakaran</li> <li>▪ Memanfaatkan potensi anggaran untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan pengendalian kebakaran</li> <li>▪ Mepedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan program</li> </ul>	<p><b>Strategi WO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>▪ Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti Pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>▪ Meningkatkan koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertumbuhan Masyarakat meningkat mengakibatkan risiko terhadap kebakaran di perumahan dan pemukiman</li> <li>▪ Perkembangan teknologi dan informasi</li> </ul>		<p>di perumahan dan pemukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan sarana prasarana pendukung agar terlaksananya cepat tanggap, respon time, pencegahan dan pengendalian kebakaran</li> </ul>
<p><b>Ancaman (Threats) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang efektifnya koordinasi dengan perangkat daerah yang lain</li> <li>▪ Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan SKPD di Bidang Pemadam Kebakaran</li> <li>▪ Masih rendahnya pemilik bangunan Gedung tentang penerapan pencegahan kebakaran</li> <li>▪ Rendahnya kesadaran Masyarakat tentang mitigasi kebakaran</li> </ul>	<p><b>Strategi ST :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan pemahaman stakeholder dan perangkat daerah di bidang pencegahan dan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan</li> <li>▪ Meningkatkan konsistensi dan komitmen kebijakan penanggulangan kebakaran</li> <li>▪ Meningkatkan focus peningkatan kapasitas pencegahan dan pengendalian berbasis masyarakat</li> </ul>	<p><b>Strategi WT :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kemampuan tata Kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam monitoring dan pengendalian pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran</li> <li>▪ Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran</li> </ul>

Keterangan : *IFAS = Internal Strategic Factors Analysis Summary*  
*EFAS = External Strategic Factors Analysis Summary*

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun program dan kegiatan pada RPD yang di susun oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta untuk tiga tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel T-C 27

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

## Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL			TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022		2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tujuan 1 : Meningkatkan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Cakupan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran	Persen	Analisis Pd	100	100	100	100	100				0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Persentase Layanan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	Analisis Pd	100	100	100	100	100				0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran													-	-	-	0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Cakupan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran	Persen	Analisis Pd	100	100	100	100	100				0	0		
					Persentase Layanan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	Analisis Pd	100	100	100	100	100				0	0		
Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran													1.355.000.000	1.405.000.000	1.455.000.000		0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	Lppd	95,76	90,16	100	100	100				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	Spm	100	100	100	100	100				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	Permendagri 86	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	Permendagri 86	-	89,56	100	100	100				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	Permendagri 114	95,76	90,16	100	100	100				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau	Persen	Permendagri 114	0	0	100	100	100				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah														
					Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	Jumlah dan Jenis	Permendagri 114	543	808	800	750	700				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota					194	65	431	421	412	885.000.000	905.000.000	925.000.000	1264	2.715.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Analisis Pd											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
				Subkegiatan : Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota															Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Dkumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Kepmenda gri 900.1.15.5-1317	2	1	1	1	2	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300	300.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Kepmenda gri 900.1.15.5-1317	2	43	140	130	120	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300	225.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Kepmenda gri 900.1.15.5-1317	78	0	24	24	24	20.000.000	30.000.000	40.000.000	300	90.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kepmenda gri 900.1.15.5-1317	100	0	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	300	30.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Kepmenda gri 900.1.15.5-1317	1	5	4	4	4	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300	300.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam	Orang	Kepmenda gri 900.1.15.5-1317	1	1	150	150	150	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300	300.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran													
				Subkegiatan : Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK)													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Kepmendaagri 900.1.15.5-1317	1	1	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300	300.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Kepmendagri 900.1.15.5-1317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Subkegiatan : Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	laporan	Kepmend agri 900.1.15.5 -1317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Subkegiatan : Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	Kepmend agri 900.1.15.5 -1317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Subkegiatan : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Kepmend agri 050/5889	1	10	50	50	50	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300	900.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Subkegiatan : Penyelenggaraan Kerja Sama Dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Kepmendagri 050/5889	8	4	8	8	8	50.00 0.000	50.00 0.000	50.00 0.000	300	150.000 .000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Kepmendagri 050/5889	0	0	50	50	50	30.00 0.000	40.00 0.000	50.00 0.000	300	120.000 .000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				51	67	100	100	100	60.00 0.000	80.00 0.000	100.0 00.00 0	300	240.000 .000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Dokumen	Analisis Pd											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	30	50	50	50	30.000.000	40.000.000	50.000.000	300	120.000.000	
Subkegiatan : Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaiakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	50	37	50	50	50	30.000.000	40.000.000	50.000.000	300	120.000.000	
Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran								1	1	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran	Dokumen	Analisis Pd											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Subkegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian Dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	1	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	300	30.000.000	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran					35	43	302	352	402	150.000.000	160.000.000	170.000.000	1056	480.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Orang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	Analisis Pd											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Subkegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat																
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Kepmenda gri 050/5889	30	35	300	350	400	50.000.000	60.000.000	70.000.000	300	180.000.000		
			Subkegiatan : Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Kepmenda gri 050/5889	4	7	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300	150.000.000		
			Subkegiatan : Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana																

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	Dokumen	Kepmendagri 050/5889	1	1	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300	150.000.000		
			Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					303	229	559	524	499	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1582	750.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Laporan	Analisis Pd											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Subkegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia																
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	Kepmendagri 050/5889	201	222	500	475	450	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300	150.000.000		
			Subkegiatan : Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi																

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	Kepmendagri 050/5889	1	0	4	4	4	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300	300.000.000	
					Subkegiatan : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Dan Evakuasi													
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Kepmendagri 050/5889	100	7	40	30	30	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300	150.000.000	
					Subkegiatan : Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Dan Evakuasi													
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	Kepmendagri 050/5889	1	0	15	15	15	50.000.000	50.000.000	50.000.000	300	150.000.000	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab				
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif Dan Akuntabel													-	-	-	0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Rpjmd	B	B	B	B	B				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Permendagri 86	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan SPBE.													-	-	-	0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Rpjmd	B	B	B	B	B				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Permendagri 86	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													13.83	13.99	14.23		0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Rpjmd	B	B	B	B	B				0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8	5	13	13	13	75.00	75.00	75.00	39	225.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Analisis Pd											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	Kepmendagri 050/5889	2	2	4	4	4	10.00	10.00	10.00	12	30.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Perangkat Daerah													
					Subkegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	1	1	1	1	10.00 0.000	10.00 0.000	10.00 0.000	3	30.000. 000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Subkegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	0	1	1	1	10.00 0.000	10.00 0.000	10.00 0.000	3	30.000. 000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Subkegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	1	1	1	1	10.00 0.000	10.00 0.000	10.00 0.000	3	30.000. 000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Subkegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab				
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kepmendagri 050/5889	1	0	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Subkegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kepmendagri 050/5889	1	0	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kepmendagri 050/5889	1	1	4	4	4	15.000.000	15.000.000	15.000.000	12	45.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							118	14	594	594	594	7.150.000.000	7.150.000.000	7.150.000.000	1782	21.450.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Analisis Pd												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Subkegiatan : Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kepmendagri 050/5889	12	12	588	588	588	7.100.000.000	7.100.000.000	7.100.000.000	1764	21.300.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Subkegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kepmendagri 050/5889	100	0	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3	15.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Subkegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Kepmendagri 050/5889	1	1	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Subkegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Kepmendagri 050/5889	1	0	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3	15.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Subkegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	Kepmendagri 050/5889	1	1	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
				Subkegiatan : Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	0	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Kepmenda gri 050/5889	1	0	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	0	0	0	0	-	-	-	0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					7	2	7	7	7	60.00 0.000	60.00 0.000	60.00 0.000	21	180.000 .000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	Analisis Pd											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Subkegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd																Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	1	1	1	1	10.00 0.000	10.00 0.000	10.00 0.000	3	30.000. 000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Subkegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd																Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	0	1	1	1	15.00 0.000	15.00 0.000	15.00 0.000	3	45.000. 000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Subkegiatan : Koordinasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	Kepmenda gri 050/5889	1	0	1	1	1	10.00 0.000	10.00 0.000	10.00 0.000	3	30.000. 000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Subkegiatan : Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD																Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kepmenda gri 050/5889	1	0	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3	15.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kepmenda gri 050/5889	1	1	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3	15.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kepmenda gri 050/5889	1	0	1	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3	30.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pemanfaatan Barang Milik Daerah Skpd													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	0	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3	15.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	Analisis Pd	243	163	11	10	10	385.000.000	380.000.000	383.000.000	31	1.148.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	Analisis Pd											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Subkegiatan : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Kepmenda gri 050/5889	15	3	0	1	0	-	10.000.000	-	1	10.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kepmenda gri 050/5889	223	149	1	1	1	300.000.000	300.000.000	300.000.000	3	900.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	0	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3	15.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	0	1	1	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3	15.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai														Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	Dokumen	Kepmenda gri 050/5889	1	4	1	1	1	20.000.000	10.000.000	20.000.000	3	50.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Penilaian Kinerja Pegawai													
				Subkegiatan : Pemulangan Pegawai Yang Pensiun													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	Kepmenda gri 050/5889	0	0	2	0	1	5.000.000	-	3.000.000	3	8.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kepmenda gri 050/5889	2	7	5	5	5	50.000.000	50.000.000	50.000.000	15	150.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
								157	83	41	41	42	825.000.000	825.000.000	1.325.000.000	124	2.975.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	Analisis Pd											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kepmenda gri 050/5889	12	13	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	3	150.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kepmendagri 050/5889	10	7	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	3	150.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kepmendagri 050/5889	9	16	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	3	150.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kepmendagri 050/5889	12	15	1	1	1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3	1.500.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kepmendagri 050/5889	12	8	1	1	1	50.000.000	50.000.000	50.000.000	3	150.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kepmendagri 050/5889	1	12	24	24	24	25.000.000	25.000.000	25.000.000	72	75.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	Kepmendagri 050/5889	100	12	12	12	12	100.000.000	100.000.000	100.000.000	36	300.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					dan Konsultasi SKPD													
				Subkegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kepmendagri 050/5889	1	0	0	0	1	-	-	500.000.000	1	500.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					16	18	25	25	25	325.000.000	325.000.000	325.000.000	75	975.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	Analisis Pd											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pengadaan Mebel													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kepmendagri 050/5889	7	2	5	5	5	75.000.000	75.000.000	75.000.000	15	225.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kepmendagri 050/5889	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab								
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Kepmendagri 050/5889	1	8	5	5	5	50.000.000	50.000.000	50.000.000	15	150.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								
					Subkegiatan : Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kepmendagri 050/5889	1	1	5	5	5	100.000.000	100.000.000	100.000.000	15	300.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								
					Subkegiatan : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kepmendagri 050/5889	6	4	5	5	5	25.000.000	25.000.000	25.000.000	15	75.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								
					Subkegiatan : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kepmendagri 050/5889	1	3	5	5	5	75.000.000	75.000.000	75.000.000	15	225.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								
					Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											18	141	32	32	64	4.453.645.600	4.453.645.600	4.453.645.600	128	13.360.936.800	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Laporan	Analisis Pd												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan							

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerintahan Daerah													
					Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kepmenda gri 050/5889	2	15	2	2	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6	15.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kepmenda gri 050/5889	12	12	5	5	5	50.000.000	50.000.000	50.000.000	15	150.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Subkegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kepmenda gri 050/5889	2	2	12	12	12	150.000.000	150.000.000	150.000.000	36	450.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kepmenda gri 050/5889	2	112	13	13	13	4.248.645.600	4.248.645.600	4.248.645.600	26	12.745.936.800	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			57	51	29	29	29	557.849.022	729.103.741	465.845.003	87	1.752.797.766	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	Analisis Pd											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kepmenda gri 050/5889	10	12	8	8	8	50.00 0.000	50.00 0.000	50.00 0.000	24	150.000 .000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kepmenda gri 050/5889	35	21	15	15	15	25.00 0.000	25.00 0.000	25.00 0.000	45	75.000. 000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pemeliharaan Mebel													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Kepmenda gri 050/5889	0	0	1	1	1	10.00 0.000	10.00 0.000	10.00 0.000	3	30.000. 000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kepmendagri 050/5889	4	8	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000	3	90.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kepmendagri 050/5889	0	0	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000	3	90.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kepmendagri 050/5889	1	2	1	1	1	352.849.022	524.103.741	260.845.003	3	1.137.797.766	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kepmendagri 050/5889	2	4	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000	3	90.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kepmendagri 050/5889	5	4	1	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000	3	90.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA			PAGU ANGGARAN			KONDISI AKHIR		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
								2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	Kepmendagri 050/5889	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
																		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

## BAB VII

Table 7.2.1.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1.	Cakupan Pengelolaan Layanan Pemadam Kebakaran	Persen	100	100	100	90.57
2.	Persentase Layanan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	100	100
3.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	BB
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	A

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan tiga tahun ke depan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta. Rencana strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang keuangan dan asset daerah untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Purwakarta, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana mestinya.